

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO

Christiaan Victor Sondakh, Paulus Kindangen, Debby Ch. Rotinsulu

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado*

ABSTRAK

Salah satu tolok ukur perekonomian suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat sekaligus dapat menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan menentukan arah pembangunan selanjutnya. Salah satu dari sekian upaya yang dilakukan adalah mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang investasi (Brahmanputra, 2009:4). Tujuan dari penelitian ini untuk melihat sektor basis yang ada di Kota Bitung dan bagaimana kebutuhan investasi di Kota Bitung. Teknik analisis yang digunakan adalah *Location quotient* (LQ) dan ICOR. Hasil yang didapat Dari 17 sektor dalam perekonomian Kota Bitung, hanya tiga sektor yang teridentifikasi sebagai sektor basis yaitu sektor Industri Pengolahan kemudian sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan sektor transportasi dan pergudangan. Kebutuhan investasi sektor industri Rp 317.291.206 juta. Kebutuhan investasi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Rp 1.804.663,5 juta. Kebutuhan investasi transportasi dan pergudangan Ulang Rp 203.263.017,9 juta.

Kata Kunci: *PDRB, Sektor Basis, ICOR*

ABSTRACT

One of the economic benchmarks of a region is economic growth. Economic growth shows the extent to which economic activity generates additional income society at a time can determine the success of development that has been achieved and determine the direction of subsequent development. One of the efforts made is to encourage economic growth by creating investment opportunities (Brahmanputra, 2009: 4). The purpose of this study is to look at the base sector in Bitung City and how the investment needs in Bitung City. The analysis technique used is *Location quotient* (LQ) and ICOR. Results From 17 sectors in the economy of Bitung City, only three sectors are identified as base sectors ie Processing Industry sector then Water Supply, Waste Management, Waste and Recycling sector and transportation and warehousing sectors. Investment requirement of industrial sector is Rp 317.291.206 million. The investment needs of the Sector Water Supply, Waste Management, Waste and Recycling Rp 1.804.663.5 million. Investment needs of transportation and replanting Rp 203.263.017,9 million.

Keywords: *GRDP, Base sectors, ICOR*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu tolok ukur perekonomian suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat sekaligus dapat menentukan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan menentukan arah pembangunan selanjutnya. Salah satu dari sekian upaya yang dilakukan adalah mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan peluang investasi (Brahmanputra, 2009:4). Dan dengan dimulainya era reformasi tahun 1999 terjadi peralihan sebagian besar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah (Armida dalam Nudiatulhuda, 2007).

Menurut Rizky (2013) dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut kreatif dalam mengembangkan perekonomian. Pamuji (2011), mengatakan Daerah dituntut untuk mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki sebagai modal untuk pembangunan daerah tersebut.

Sejak fase ini pemerintahan yang dulunya terpusat kini menjadi desentralisasi, hal ini juga menandai bahwa reformasi perekonomian dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh tanah air kian digalakkan. Dengan adanya desentralisasi menjadi jalan bagi pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan dengan maksimal potensi yang dimiliki daerah, karena pemerintah daerah dinilai akan lebih menguasai kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu pula untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selain diberi wewenang tersendiri kepada daerah untuk dapat menjalankan roda pemerintahannya baik dalam merencanakan, merumuskan dan menjalankan perekonomiannya yang tergambar dalam perencanaan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana pemerintah daerah mendapatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer dan total pendapatan asli daerah yang dikumpulkan untuk kemudian disusun menjadi rencana anggaran. Dalam pengelolaan anggaran ini tentunya pemerintah daerah harus menetapkan tujuan pembangunan untuk dapat beralih dari perekonomian agraris menjadi perekonomian industrialis.

Salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah.

Kota Bitung terletak pada posisi geografis $1^{\circ}23'23''$ - $1^{\circ}35'39''$ LU dan $125^{\circ}1'43''$ - $125^{\circ}18'13''$ BT. Wilayah daratan Kota Bitung mempunyai luas 33.279,10 ha, terbagi dalam delapan wilayah Kecamatan serta 69 kelurahan. Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Utara dan Laut Maluku. Di bagian selatan terdapat sebuah pulau yakni Pulau Lembeh. Potensi Pengembangan Wilayah Kota Bitung berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bitung Tahun 2013 – 2033 dan karakteristik wilayah maka Kota Bitung memiliki beberapa

wilayah kawasan untuk dikembangkan atau kawasan budidaya. Sehingga dapat mewujudkan Kota Bitung sebagai Pusat Kegiatan Nasional menjadi pintu masuk ke Provinsi Sulawesi Utara yang berbasis pada kegiatan perdagangan/jasa dan kelautan/perikanan melalui pengembangan sektor industri dan sektor pertanian serta pengelolaan kawasan lindung yang berkelanjutan, yang dapat mendukung upaya pengembangan kota dalam kerangka pengembangan sistem perkotaan yang secara hirarkis dapat menjadi pusat-pusat pengembangan wilayah.

Melalui PP No. 32 tahun 2014 Kota Bitung kembali ditetapkan menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia. Dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus seluas 534 Ha (lima ratus tiga puluh empat hektar) yang terletak dalam wilayah Kecamatan Matuari, Kota Bitung ini diharapkan akan mampu mempercepat pembangunan bukan hanya di Kota Bitung atau Provinsi Sulawesi Utara namun secara nasional, tentu dengan berbagai pertimbangan, seperti memiliki akses ke BIMP-EAGA, AIDA, Asia Timur dan Pasifik, IHP, serta dikarenakan Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu penghasil perikanan terbesar di Indonesia dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB, serta ketersediaan sumber daya kelautan yang memadai. Selain itu rencana pengembangan KEK Bitung telah terintegrasi dengan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung serta komitmen dari pemerintah Kota Bitung untuk mengembangkan iklim investasi dengan pembentukan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dengan dikenalnya Kota Bitung sebagai kota industri terlebih dalam industri perikanan yang menjadi salah satu sektor perekonomian basis di Kota Bitung sesuai dengan julukannya Kota Cakalang. Tentu selain pengolahan perikanan ada juga kebutuhan lain yang perlu untuk disediakan Kota Bitung yang notabene adalah tuan rumah. Untuk itu menarik dilihat bagaimana kesiapan sektor-sektor perekonomian di Kota Bitung dalam menghadapi pelaksanaan KEK. Bagaimana kesiapan sektor-sektor ini dalam upaya pemenuhan kebutuhan di Kawasan Ekonomi Khusus ini akan dapat berjalan dengan maksimal. Apakah sektor-sektor ekonomi yang kemungkinan besar menjadi pemasok kebutuhan KEK sudah siap dan menjadi sektor basis di Kota Bitung, dan bagaimana perkembangan yang terjadi pada sektor-sektor basis ini apabila dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Utara.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Sektor-sektor apa saja yang menjadi basis Kota Bitung ?
2. Bagaimana Kebutuhan Investasi di sektor-sektor ekonomi basis Kota Bitung Dalam Menghadapi Kawasan Ekonomi Khusus ?

Tujuan Masalah

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Kota Bitung dalam rangka menghadapi Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Untuk mengetahui kebutuhan investasi Kota Bitung dalam memenuhi permintaan komoditi pada Kawasan Ekonomi Khusus yang berasal dari sektor-sektor perekonomian yang dimiliki.

Manfaat Penelitian

- Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Bitung untuk dapat menetapkan prioritas belanja investasi di sektor-sektor ekonomi yang dimiliki
- Untuk melihat bagaimana perkembangan Perekonomian di Kota Bitung dari tahun ke tahun
- Untuk digunakan pihak yang berkepentingan untuk menganalisa masalah-masalah yang berhubungan dengan pengelolaan fiskal Kota Bitung.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Pengertian Investasi

Menurut Rostow bahwa setiap usaha untuk tinggal landas mengharuskan adanya mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup dalam kerangka mempercepat pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000:95). Tentunya hal ini bisa diwujudkan dengan investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan mengena pada sektor-sektor basis perekonomian.

Investasi meliputi pengeluaran/perbelanjaan sebagai berikut:

- a) Pembelian berbagai jenis barang modal,
- b) Perbelanjaan untuk membangun bangunan operasional,
- c) Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual (Sukirno, 1994:107).

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 2003:4). Menurut Samuelson (2004: 198), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi diwaktu mendatang. Investasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam GNP. Investasi memiliki peran penting dalam permintaan agregat. Pertama bahwa pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat menyebabkan resesi. Kedua, bahwa investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan dalam produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tenaga kerja dan jumlah stok kapital (Eni Setyowati dan Siti Fatimah N: 2007).

Teori Investasi

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok kapital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Di negara yang tingkat penganggurannya tinggi, seperti Indonesia sekarang, angkatan kerja yang menganggur dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembentukan modal.

1. Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasik, *Sollow* dan *Swan* memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010: 88-89).
2. Teori Harrod-Domar. *Harrod-Domar* mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar (Sadono, 2007: 256-257).

Jenis-Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu: Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA).

Mengapa Perlu Investasi

Saat ini kesadaran setiap daerah tentang pentingnya investasi masih sangat minim. Masih banyak daerah yang belum memikirkan tentang pentingnya investasi sebagai tabungan masa depan atau bahkan menambah kekayaan. Kebutuhan investasi saat ini masih dikesampingkan. Perlu diketahui, dengan berinvestasi setiap daerah

sudah menyiapkan tabungan untuk masa depan. Selain itu investasi bisa membuat suatu daerah sejahtera menjadi kaya ditengah ekonomi yang tidak stabil.

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad 1999:116). Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor basis apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno 2000:146).

Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (*economic base theory*). Menurut Glasson (1990:63-64), konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu:

1. Sektor-Sektor Basis

Sektor basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat diluar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan.

2. Sektor-sektor Bukan Basis

Sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal didalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan. Sektor-sektor tidak mengekspor barang-barang. Ruang lingkup mereka dan daerah pasar terutama adalah bersifat lokal.

Identifikasi Sektor Basis dan Non-Basis

Salah satu cara dalam menentukan suatu sektor sebagai sektor basis atau non-basis adalah analisis Location Quotient (LQ). Arsyad (1999:315) menjelaskan bahwa teknik Location Quotient dapat membagi kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi dua golongan yaitu:

1. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang bersangkutan. Sektor ekonomi seperti ini dinamakan sektor ekonomi potensial (basis).
2. Kegiatan sektor ekonomi yang melayani pasar di daerah tersebut dinamakan sektor tidak potensial (non basis) atau local industri.

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (job creation) (Arsyad, 1999).

Kawasan Ekonomi Khusus

Sejarah KEK tidak terlepas dari munculnya kawasan-kawasan industri yang telah ada di abad ke-19. Pada tahun 1876 kawasan industri di kembangkan di Inggris, yaitu Trafford Park Estate dengan luas sekitar 500 ha yang merupakan kawasan industri terluas sampai tahun 1950-an. Selanjutnya pada awal abad 20, di Amerika Serikat, dikembangkan kawasan industri di Kota Chicago antara lain Central Manufacturing District yang dibangun pada tahun 1909 seluas 215 ha dan the Pershing Road District yang dibangun pada tahun 1910 dengan luas 40 ha. (Mulyadi dan Monstiska, majalah kawasan (2011: 1).

Istilah KEK atau Special Economic Zone (SEZ) sebagai suatu industrial park diperkenalkan di Puerto Rico di tahun 1947. KEK saat itu dibangun dengan tujuan menangkap peluang investasi dari daratan Amerika Serikat (Kumar, 2008). Konsep ini kemudian diadopsi oleh Irlandia dan Taiwan pada tahun 1960-an. Namun negeri Cina lah yang membuat KEK menjadi terkenal di seluruh dunia, yang berawal di Kota Shenzhen. Banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan KEK sebagai suatu kawasan. Hal ini sangat masuk akal karena KEK, bukanlah konsep baru. KEK berkembang dari kawasan industri yang telah ada jauh sebelum konsep KEK dikenal. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya negara yang awalnya memiliki kawasan industri kemudian merubahnya menjadi KEK. Menurut Knowledge Innovation Zone Research Report tahun 2006, konsep Special Economic Zone (SEZ), memiliki banyak sinonim (alternatif konsep) antara lain : Free Economic Zones, Free Trade Zones, Enterprise Free Zones, Enterprise Trade Zones, Export Processing Zones, Free Ports, Foreign Trade Zones, New Export Distribution Centers dan Regional Foreign Trade Zones. Sebagai contoh ; di India, awalnya kawasan industri yang ada disebut Export Processing Zones (EPZ) atau zona pemrosesan export, yang telah ada sejak tahun 1965. Namun kemudian ada delapan EPZ dikonversi menjadi KEK, ditahun 2000. (Kumar, 2008).

Sejarah KEK DI Dalam Negeri

Sama seperti kondisi di luar negeri, KEK di dalam negeri, didasari pada perkembangan kawasan industri yang telah ada di era tahun 1970-an. Namun secara formal, baru lahir sejak dikeluarkannya UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Bandingkan dengan India di era akhir tahun 2000, dan China di tahun 1980-an. Sampai saat ini di Indonesia telah ditetapkan 8 KEK dan yang sudah beroperasi sebanyak 3 KEK (Sei Mangkey, Tanjung Lesung dan Mandalika).

Lahirnya istilah KEK di Indonesia seiring dengan lahirnya UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah menyebutkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada Bab XIV dalam pasal 31. KEK sebenarnya, telah digulirkan jauh sebelum adanya UU No 25 tahun 2007. Hal ini dapat dilihat pada tanggal 25 Juni 2006, Presiden Susilo Bambang Yudoyono, melakukan penandatanganan kerja sama pembentukan Special Economic Zone (SEZ) bersama perdana menteri Singapura Lee Hsien Loong di Turi Beach Resort. Jadi sebelum pengaturan KEK tersebut, sebenarnya cikal bakal terbentuknya KEK sudah dilakukan oleh pemerintah RI dengan pemerintah Singapura. Jadi UU No 25/2007 hanya merupakan salah satu justifikasi atau legalitasnya. Saat ini KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Lokasi KEK

Menurut UU No 39/2009, pasal 4, KEK harus memenuhi kriteria :

1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan mendukung KEK;
3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya basis; dan
4. Mempunyai batas yang jelas.

Untuk point 3, Yang dimaksud dengan “jalur pelayaran internasional” adalah:

1. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI);
2. Jaringan pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan internasional hub di Indonesia dan pelabuhan internasional di Indonesia; dan
3. Jaringan pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan internasional hub dan pelabuhan internasional dengan pelabuhan internasional di negara lain.

Untuk point 4, Yang dimaksud dengan “mempunyai batas yang jelas” adalah batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok). Juga menurut PP No 2/2011, pasal 11, pada batas KEK harus ditetapkan pintu keluar dan masuk barang untuk keperluan pengawasan barang yang masih terkandung kewajiban kepabeanan.

Keuntungan dan Kelemahan KEK

Sebagai suatu kawasan industri, KEK, tentunya memiliki keuntungan dan kelemahan. Secara umum, keuntungan KEK adalah mencakup kemudahan dalam :

1. Aspek kepabeanan (custom and excise)
2. Perpajakan
3. Perijinan (licensing); one stop service
4. Keimigrasian
5. Ketenagakerjaan
6. Infrastruktur yang sangat baik: jalan, listrik, bahan bakar, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan, logistik
7. Pelabuhan yang terbuka 24 jam
8. Bebas dari korupsi
9. Keamanan berstandar internasional
10. Organisasi pengelola yang profesional

Menurut Mulyadi dan Monstiska, (2011:4-5), ada 3 (tiga) keuntungan utama dari kawasan industri yaitu:

1. Memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sebagai contoh ; pada akhir 2006, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten mencapai 6.24%, dengan PDRB (produk domestic regional bruto) mencapai 94 triliun, dengan kontribusi sektor industri sebesar 49.75 %.
2. Meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur, ketersediaan infrastruktur dari kawasan industri dapat mengurangi biaya infrastruktur yang harus dikeluarkan oleh perusahaan industri.
3. Menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, kawasan industri akan menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, dan secara tidak langsung maupun langsung akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusianya.

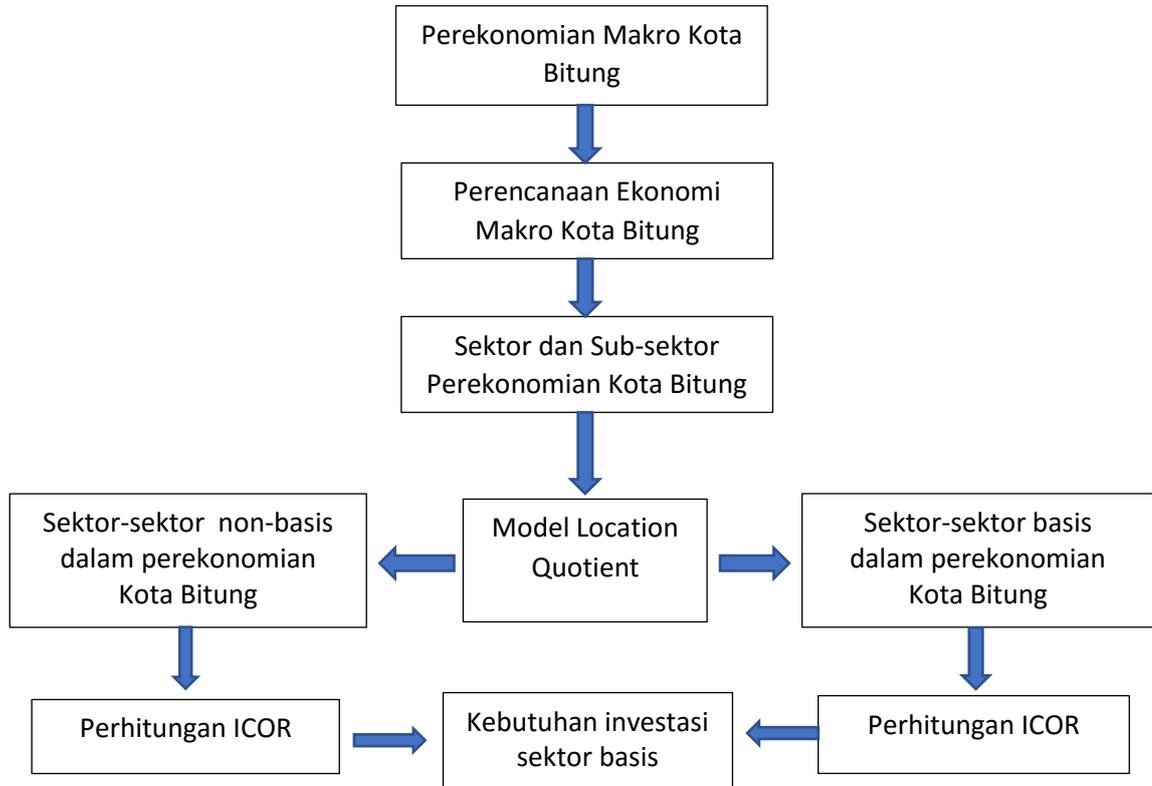
Disamping keuntungan atau keunggulan KEK, juga ada kelemahan atau masalah yang tercipta seiring berkembangnya KEK. Menurut Mulyadi dan Monstiska, (2011:4-5), ada 3 (tiga) kelemahan utama dari kawasan industri yaitu menyangkut aspek lingkungan, misalnya: polusi dan limbah. Polusi dan limbah dapat berupa polusi udara, air dan suara maupun tanah. Polusi dan limbah ini dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal disekitar kawasan industri. Namun dengan pengelolaan polusi dan limbah yang efektif maka akan mereduksi dampak lingkungan dari kawasan industri tersebut.

Menurut Mulyadi dan Monstiska, (2011:4-5), permasalahan yang sering terjadi, terkait kawasan industri adalah :

1. Permasalahan lingkungan hidup : mengenai izin pengelolaan limbah B3 yang semakin condong mengikuti perkembangan aturan-aturan yang diciptakan oleh konvensi lingkungan hidup internasional. Permasalahan atas lingkungan hidup ini, akan berpengaruh terhadap izin usaha industri, izin impor bahan baku, serta izin ekspor.

2. Permasalahan tata ruang kawasan industri: memang telah ada peraturan tentang tata ruang, sesuai dengan PP No 24/2009 tentang kawasan industri, namun tetap ada beberapa industri yang didirikan di luar kawasan industri.
3. Permasalahan atas dukungan dan komitmen pemerintah daerah: khususnya tentang hal perizinan dan mekanisme insentif yang menarik bagi investor. Dalam banyak kasus, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan peraturan kawasan industri, misalnya: terkait redistribusi atas izin gangguan dari pemerintah daerah Banten, yang membebankan biaya ini pada masing-masing perusahaan di dalam kawasan industri, yang seharusnya dibebankan saja pada pengelola kawasan industri. Komitmen pembangunan infrastruktur juga harus ada, agar fasilitas fisik kawasan industri, dapat dibangun dengan baik dan lancar.
4. Permasalahan energi: dapat berupa kekurangan pada energi listrik maupun gas, yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan dalam kawasan industri.
5. Permasalahan lahan, rencana pengembangan kawasan dan manajemen pengelolaan kawasan. masalah ini dapat berupa : ketidakpastian terkait status kawasan sebagai free trade zone (seperti terjadi di pulau janda berhias (Batam), sehingga banyak investor yang menunda investasinya.
6. Permasalahan promosi kawasan industri.

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan didalam penelitian ini adalah data sekunder, data yang telah ada dan tersedia dalam beberapa laporan, terutama dari Badan Pusat Statistik Kota Bitung data yang dikumpulkan meliputi periode 2010-2015.

Metode Analisis Data

Location Quotient (LQ)

Metode *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengidentifikasi atau menentukan sektor basis atau sektor basis dalam perekonomian Kota Bitung, mengacu pada pada formula Hoover (1975: 147), Azis (1994: 154); Bendavid-Val 8 (1991). Prinsip metode analisis ini adalah membandingkan persentase sumbangan masing-masing sektor dalam PDRB Kota Bitung dengan persentase sumbangan sektor yang sama pada PDRB Provinsi Sulawesi Utara. Adapun persamaannya sebagai berikut:

$$LQ = \frac{vi/vt}{Vi/Vt} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana :

LQ = Location Quotient

vi = Nilai tambah sektor i di Kota Bitung

vt = Nilai tambah total di Kota Bitung

Vi = Nilai tambah sektor i Sulawesi Utara

Vt = Nilai tambah total Sulawesi Utara

Kriterianya adalah :

1. Jika $LQ > 1$ menunjukkan sektor ke-i di Kota Bitung tergolong sektor basis, atau sektor i di Kota Bitung lebih spesialis dari pada sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Jika $LQ < 1$ menunjukkan sektor ke-i di Kota Bitung tergolong sektor non basis, atau sektor i di Kota Bitung kurang spesialis dari pada sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Jika $LQ = 1$ menunjukkan keswasembadaan (*self-sufficiency*) sektor i di Kota Bitung, atau sektor i di Kota Bitung memiliki spesialis yang sama dengan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Utara.

Pengertian LQ

Metode LQ adalah metode yang membandingkan porsi lapangan kerja/jumlah produksi/nilai tambah untuk sektor tertentu di suatu wilayah dibandingkan dengan porsi lapangan kerja/jumlah produksi/nilai tambah untuk sektor yang sama secara nasional. Tujuan metode LQ ini untuk mengidentifikasi sektor basis dalam suatu wilayah.

Penafsiran LQ

Dunia dapat dilihat sebagai kumpulan daerah. Setiap daerah (tunggal) mempunyai sistem pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja, produksi, yang merupakan kegiatan memperkembangkan industri dan kegiatan lainnya di dalam daerah tersebut. Setiap daerah berusaha mencukupi kebutuhannya dan mengembangkan daerahnya secara maksimum. Adanya kekurangan dan kelebihan menyebabkan kegiatan impor-ekspor antar daerah. Barang dan jasa yang diimpor oleh suatu daerah adalah ekspor dari daerah lain, yang menurut teori merupakan kelebihan dari daerah disebut terakhir. Struktur perumusan LQ memberikan beberapa nilai sebagai berikut:

$$LQ < 1, \text{ atau } LQ = 1, \text{ atau } LQ > 1.$$

Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)

Metode Incremental Capital Output Ratio (ICOR) digunakan menentukan kebutuhan tambahan kapital atau investasi sektor-sektor basis dan non basis dalam perekonomian di Kota Bitung. Formula yang digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi, mengacu pada Kadariah (1981: 27) dan Arsyad (1999: 233-251), yaitu:

$$\begin{aligned} \text{ICOR} &= \Delta K_t / \Delta Y_t \\ \Delta K_t &= I_t = \text{ICOR} \times \Delta Y_t \\ \Delta Y_t &= g_t \times Y_{t-1} \\ g_t &= \Delta Y_t / Y_{t-1} \\ \text{Jadi: } \Delta K_t &= I_t = \text{ICOR} \times g_t \times Y_{t-1} \dots\dots\dots (2) \end{aligned}$$

Dimana:

- ICOR = Rasio pertambahan modal dan output (Incremental Capital Output Ratio, ICOR) (umumnya ICOR sektor pertanian 3, sektor industri 5 dan sektor jasa 5) (Made, 2007 hal 9)
- $\Delta K_t = I_t$ = Tambahan kapital/modal untuk investasi sektor ke-i tahun ke-t,
- ΔY_t = Tambahan nilai tambah atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t akibat adanya pertumbuhan ekonomi tahun ke-t,
- Y_{t-1} = nilai tambah bruto atau output atau PDRB sektor ke-i tahun ke-t-1,
- g_t = Pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t atau target pertumbuhan sektor ke-i tahun ke-t.

Prediksi Trend

Proyeksi target pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan proyeksi nilai tambah bruto (PDRB) suatu sektor periode 2010-2015 sebagai jangka waktu perencanaan menggunakan metode *Trend linier* menggunakan metode kuadrat terkecil (*the least square's method*), dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Y &= a + bX + e \\ b &= \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \\ a &= Y - bX \dots\dots\dots (3) \end{aligned}$$

Dimana:

Y = PDRB Periode 2010-2015

X = Tahun 2010-2015

a = intersep

b = Koefisien regresi

e = error term

Prediksi dengan menggunakan *Teknik Regresi Trend* didasarkan pada sudut pandang bahwa perkiraan masa datang akan sangat ditentukan oleh kondisi dan kenyataan yang terjadi pada masa lalu. Bila kenyataan masa lalu menunjukkan bahwa perkembangan suatu aspek pembangunan cukup cepat, maka prediksi masa datang juga akan menunjukkan perkembangan dengan tendensi yang hampir sama. (Sjafrizal, 2014: 228).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Analisis LQ (*Location Quotient*)

Sebelum melakukan perhitungan kebutuhan investasi sektor basis, terlebih dulu dilakukan identifikasi sektor basis dalam perekonomian Kota Bitung. Identifikasi ini penting dilakukan sebagai dasar perencanaan alokasi sumberdaya investasi, Karena sektor basis adalah sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan yang akan mendatangkan tambahan pendapatan yang dihasilkan oleh sektor basis setelah terpenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Identifikasi dilakukan dengan menggunakan formula *Location Quotient* (LQ), yakni membandingkan secara relatif nilai tambah suatu sektor (PDRB sektor) terhadap nilai tambah total (PDRB Bitung) dengan nilai tambah sektor yang sama (PDRB sektor Provinsi Sulut) terhadap nilai tambah total (PDRB Sulut).

Hasil identifikasi menemukan bahwa dari 17 (tujuh belas) sektor di Kota Bitung hanya 3 (tiga) sektor yang memperoleh nilai LQ lebih dari 1 (satu) yaitu: Sektor Industri Pengolahan 3,59 artinya untuk sektor ini Kota Bitung telah mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Kemudian sektor yang nilai LQ lebih dari 1 (satu) adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,48 artinya untuk sektor ini Kota Bitung juga mampu memenuhi segala kebutuhan daerahnya sendiri. Terakhir sektor Transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ sebesar 1,43 artinya sektor ini telah mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri. Secara umum dapat pula diartikan bahwa sektor-sektor basis tidak hanya mampu memproduksi untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri, tetapi juga mampu memasok untuk kebutuhan daerah lain. Hasil dari Identifikasi sektor basis dapat dilihat pada (tabel 1) dibawah ini:

Tabel. 1
Hasil Perhitungan dengan Analisis *Location Quotient*
Kota Bitung Tahun 2011-2015

No	Sektor Ekonomi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata	Ket
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.75	0.77	0.77	0.81	0.83	0.79	0.79	Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	Non Basis
3	Industri Pengolahan	3.66	3.63	3.62	3.57	3.60	3.55	3.59	Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.86	0.85	0.85	0.86	0.87	0.90	0.87	Non Basis
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.55	1.51	1.48	1.46	1.43	1.53	1.48	Basis
6	Konstruksi	0.74	0.72	0.73	0.71	0.75	0.81	0.74	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.68	0.64	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	1.37	1.40	1.41	1.42	1.43	1.51	1.43	Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.40	0.39	0.39	0.37	0.35	0.37	0.37	Non Basis
10	Informasi dan Komunikasi	0.46	0.46	0.47	0.46	0.42	0.44	0.45	Non Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.83	0.82	0.80	0.81	0.79	0.80	0.81	Non Basis
12	Real Estate	0.68	0.66	0.65	0.64	0.62	0.64	0.64	Non Basis
13	Jasa Perusahaan	0.29	0.28	0.28	0.27	0.26	0.27	0.27	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26	Non Basis
15	Jasa Pendidikan	0.24	0.26	0.28	0.28	0.29	0.30	0.28	Non Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.57	0.57	0.57	0.56	0.56	0.57	0.57	Non Basis
17	Jasa lainnya	0.42	0.41	0.41	0.41	0.41	0.43	0.42	Non Basis

Sumber Data : Diolah

Proyeksi PDRB

Proyeksi PDRB sektor basis dihitung dengan menggunakan persamaan garis trend, yaitu dengan menggunakan metode jumlah kuadrat terkecil (*the least square's method*). Analisis ini digunakan untuk mengetahui prediksi PDRB di masa yang akan datang. Dalam analisis ini digunakan PDRB selama 6 tahun 2010-2015 dengan menggunakan *views* 8 .

$$Y = a + bX + e$$

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = Y - bX$$

Hasil Regresi untuk sektor industri pengolahan sebagai berikut:

$$Y = 2.520.000 + 126.899X$$

Karena regresi ini dilakukan dengan menggunakan data selama 6 tahun (2010-2015), maka proyeksi akan dapat dilakukan untuk tahun 2016 (t=7), 2017 (t=8), 2018 (t=9), 2019 (t=10), 2020 (t=11), 2021 (t=12) sebagai berikut:

$$\hat{Y}_7 = 2.520.000 + 126.899 (7) = 3.408.293$$

$$\hat{Y}_8 = 2.520.000 + 126.899 (8) = 3.535.192$$

$$\hat{Y}_9 = 2.520.000 + 126.899 (9) = 3.662.091$$

$$\hat{Y}_{10} = 2.520.000 + 126.899 (10) = 3.788.990$$

$$\hat{Y}_{11} = 2.520.000 + 126.899 (11) = 3.915.889$$

$$\hat{Y}_{12} = 2.520.000 + 126.899 (12) = 4.042.788.$$

Dapat dilihat untuk masing-masing sektor basis pada tabel.2

Tabel. 2
Hasil Proyeksi Nilai Tambah Bruto Sektor Basis di Kota Bitung Tahun 2016-2021
(Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Industri Pengolahan	3.408.293	3.535.192	3.662.091	3.788.990	3.915.889	4.042.788
2	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	19.421	20.143	20.865	21.587	22.309	23.031
3	Transportasi dan Pergudangan	2.173.577	2.254.088	2.334.599	2.415.110	2.495.621	2.576.132

Catatan:

1. Proyeksi menggunakan *Trend Linier*
2. Hanya sektor basis

Dari hasil yang diperoleh dengan menggunakan teknik prediksi PDRB dimasa yang akan datang. Hasil yang diperoleh sesuai dengan ekspektasi teoritik prediksi PDRB Kota Bitung tahun 2016-2021 menunjukkan hasil yang terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini sesuai dengan yang dikatakan (Sjafrizal 2014:228) yang mengatakan bahwa prediksi didasarkan pada sudut pandang bahwa perkiraan masa datang akan sangat ditentukan oleh kondisi dan kenyataan yang terjadi pada masa lalu. Bila kenyataan masa lalu menunjukkan bahwa perkembangan suatu aspek pembangunan cukup cepat, maka prediksi masa datang juga menunjukkan perkembangan dengan tendensi yang hampir bersamaan.

Prediksi untuk pertumbuhan ekonomi sektor basis menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

$$PE_{2017} = \frac{3.535.192 - 3.408.293}{3.408.293} \times 100\%$$

$$PE_{2017} = \frac{126.899}{3.408.293} \times 100\%$$

$$PE_{2017} = 3.72$$

Dapat dilihat untuk masing-masing sektor basis pada tabel.3

Tabel. 3
Hasil Proyeksi Target Pertumbuhan Sektor Basis di Kota Bitung
Tahun 2017-2021 (dalam %)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Industri Pengolahan	3.72	3.59	3.47	3.35	3.24	3.47
2	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.72	3.58	3.46	3.34	3.24	3.47
3	Transportasi dan Pergudangan	3.70	3.57	3.45	3.33	3.23	3.46

Catatan:

1. Proyeksi menggunakan *Trend Linier*
2. Hanya sektor basis

Dari hasil yang didapat proyeksi untuk target pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung untuk sektor Basis Industri Pengolahan proyeksi target pertumbuhan tahun 2017 sebesar 3.72 mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 3.59 dan terus mengalami penurunan sampai 2021 sebesar 3.24 target rata-rata pertumbuhan sektor Industri Pengolahan sebesar 3.47. Kemudian untuk sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang target pertumbuhan tahun 2017 sebesar 3.72 tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 3.58, dan terus mengalami penurunan pertumbuhan sampai tahun 2021 sebesar 3.24 dan target rata-rata pertumbuhan sebesar 3.47. Dan target pertumbuhan untuk sektor Transportasi dan Pergudangan tahun 2017 sebesar 3.70 mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 3.57 mengalami penurunan terus sampai pada tahun 2019 sebesar 3.45 dan sampai pada tahun 2021 turun sebesar 3.46. Kondisi ini sesuai dengan yang dikatakan (Sjafrizal 2014:228) yang mengatakan bahwa prediksi didasarkan pada sudut pandang bahwa perkiraan masa datang akan sangat ditentukan oleh kondisi dan kenyataan yang terjadi pada masa lalu. Bila kenyataan masa lalu menunjukkan bahwa perkembangan suatu aspek pembangunan cukup cepat, maka prediksi masa datang juga akan menunjukkan perkembangan dengan tendensi yang hampir bersamaan begitu sebaliknya.

Kebutuhan Investasi Sektor Basis

Kebutuhan investasi di sektor basis diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut (made 2007 hal 13) :

$$\Delta K_t = I_t = ICOR \times g_t \times Y_{t-1}$$

1. Sektor industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Transportasi dan Pergudangan masing-masing 5.
2. Prediksi pertumbuhan untuk sektor ekonomi (g_t) yang direncanakan periode 2017 – 2021 untuk sektor basis lihat rumus (4) hasilnya lihat tabel 4.3.
3. Perhitungan kebutuhan investasi untuk sektor Industri Pengolahan di Kota Bitung sebagai berikut:

$$I_{t2017} = 5 \times 3.72 \times 3.408.293 = 63.394.249$$

$$I_{t2018} = 5 \times 3.59 \times 3.535.192 = 63.456.696$$

$$I_{t2019} = 5 \times 3.47 \times 3.662.091 = 63.537.278$$

$$I_{t2020} = 5 \times 3.35 \times 3.788.990 = 63.465.582$$

$$I_{t2021} = 5 \times 3.24 \times 3.915.889 = 63.437.401$$

Total kebutuhan investasi Kota Bitung tahun 2017-2021 di sektor industri pengolahan sebesar 317.291.206 juta rupiah.

Hasil analisis untuk kebutuhan investasi pada masing-masing sektor basis dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4.
Kebutuhan Investasi Sektor Basis di Kota Bitung 2017-2021 (Juta Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1	Industri Pengolahan	63.394.249	63.456.696	63.537.278	63.465.582	63.437.401	317.291.206
2	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	361.230,6	360.559,7	360.964,5	360.502,9	361.405,8	1.804.663,5
3	Transportasi dan Pergudangan	40.211.174,5	42.264.150	40.271.832,75	40.211.581,5	40.304.279,15	203.263.017,9

Catatan:

1. ICOR
2. Hanya sektor basis

Berdasarkan hasil pada tabel 4. kebutuhan investasi sektor basis di Kota Bitung dengan menggunakan ICOR menunjukkan tren yang berfluktuatif atau cenderung mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Berfluktuatifnya kebutuhan investasi di Kota Bitung dipengaruhi oleh berfluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Kota Bitung. Untuk itu dengan adanya kebutuhan investasi ini diharapkan akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini tidak sejalan dengan dilakukan oleh Made Antara, (2010) hasil untuk kebutuhan investasi di Provinsi Bali setiap tahunnya mengalami kenaikan kebutuhan investasi.

Pembahasan

Kebutuhan Investor Sektor Industri Pengolahan

Kebutuhan investasi ini di butuhkan pemerintah dalam menunjang sektor dan subsektor industri pengolahan dalam hal infrastruktur, sarana dan prasarana, keamanan, kenyamanan lingkungan sehingga menarik pelaku-pelaku ekonomi dalam berinvestasi. Dengan tersedianya infrastruktur dan penunjang-penunjang lainnya dalam mengelola potensi sumber daya yang ada lebih memudahkan bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Bitung.

Kebutuhan Investasi Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Kebutuhan investasi ini di butuhkan pemerintah dalam menunjang sektor Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dalam hal infrastruktur, sarana dan prasarana, keamanan, kenyamanan lingkungan sehingga menarik pelaku-pelaku

ekonomi dalam berinvestasi. Dengan tersedianya infrastruktur dan penunjang-penunjang lainnya dalam mengelolah potensi sumber daya yang ada lebih memudahkan bagi para investor untuk berinvestasi di Kota Bitung.

Kebutuhan Investasi Sektor Transportasi dan Pergudangan

Dengan adanya pelabuhan samudera terbesar di Sulawesi Utara yang terdapat di Kota Bitung, hal ini menjadikan Kota Bitung sebagai kota yang sibuk. Baik untuk mobilitas penduduk maupun barang antar pulau dan daerah. Dengan tingginya aktivitas di Kota Bitung untuk sektor transportasi khususnya terlebih transportasi laut. Kondisi ini memberikan potensi besar bagi perekonomian Kota Bitung jika benar-benar mengelolah potensi transportasi sebagai salah satu sektor basis di Kota Bitung. Sektor ini kedepannya mampu memberikan kontribusi yang besar bagi Kota Bitung apabila dikelola dengan baik. Dan perlu ada pengembangan lagi untuk sektor transportasi darat agar mampu memberikan kenyamanan bagi para pendatang yang berkunjung ke Kota Bitung baik itu untuk wisata maupun untuk berinvestasi. Sehingga dengan kondisi transportasi yang semakin baik di Kota Bitung diharapkan dapat mengembangkan potensi-potensi sektor lain untuk berkembang seperti sektor pariwisata di Kota Bitung. Karena akses transportasi yang mudah masyarakat luar daerah tertarik untuk berkunjung di kota Bitung. Jadi pengembangan sektor basis sektor transportasi dan pergudangan melalui investasi memiliki prospek yang cerah, Karena Kota Bitung merupakan daerah lintas beberapa provinsi di Indonesia. Jika dana investasi tersedia yang besarnya sesuai dengan perhitungan kebutuhan setiap tahun, maka perencanaan pembangunan di Kota Bitung dapat mengarahkannya ke sektor ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari 17 sektor dalam perekonomian Kota Bitung, hanya tiga sektor yang teridentifikasi sebagai sektor basis yang ditunjuk oleh nilai LQ (Rata-rata 3.59) > 1, yaitu sektor Industri Pengolahan kemudian sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan nilai LQ rata-rata 1,48 dan sektor transportasi dan pergudangan dengan nilai LQ rata-rata 1,43.
2. Berdasarkan ICOR, target pertumbuhan dan nilai tambah bruto (PDRB) sektor-sektor basis sebelum tahun ke-t (Y_{t-1}), maka dapat diperkirakan kebutuhan investasi masing-masing sektor basis di Kota Bitung.
 - Kebutuhan investasi sektor industri pengolahan periode 2017-2021 sebesar Rp 317.291.206 juta.
 - Kebutuhan investasi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang periode 2017-2021 sebesar Rp 1.804.663,5 juta.

- Kebutuhan investasi transportasi dan pergudangan Ulang periode 2017-2021 sebesar Rp 203.263.017,9 juta.
3. Kebutuhan investasi sektor basis di Kota Bitung dengan menggunakan ICOR menunjukkan tren yang berfluktuatif atau cenderung mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. Berfluktuatifnya kebutuhan investasi di Kota Bitung dipengaruhi oleh berfluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Kota Bitung. Untuk itu dengan adanya kebutuhan investasi ini diharapkan akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Saran

1. Dalam rangka perencanaan sebaiknya pemerintah menerapkan prinsip-prinsip perencanaan yang ilmiah. Artinya perencanaan yang berbasis data dan informasi yang akurat, metode dan peralatan analisis ilmiah, sehingga menghasilkan rencana atau program kegiatan yang layak diterapkan untuk mencapai tujuan dan target-target perencanaan secara tepat.
2. Karena sumberdaya investasi yang semakin terbatas, baik sumber dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri, sebaiknya alokasi dan investasi diprioritaskan untuk pengembangan sektor-sektor basis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed Abdulrahman Khder Aga, 2014** *“The Impact of foreign direct investment on economic growth : A case study of Turkey 1980-2012”*
- Arsyad, Lincoln. 2010.** Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Arsyad, Lincoln. 1999.** Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta : BPFE
- Bendavid-Val, A., 1991.** *Regional and Local Economic Analysis for Practitioners.* New York: Greenwood Publishing Group, Inc.
- Eni Setyowati dan Siti Fatimah. 2007.** Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dalam Negeri di Jawa Tengah 1980-2002. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Glasson, Jhon. 1990.** *Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.* Seminar ekonomi regional se-Indonesia. Hal 2. Jakarta.
- Hoover, Edgar M, 1975,** An Introduction to regional economics, Alfred A, Knopt, New York
- Made Antara, 2010** “Kebutuhan investasi sektor basis dan non basis dalam perekonomian regional Bali”

- Samuelson, Paul dan Nordhaus William D. 2004.** Ilmu Makroekonomi. PT Media Global Edukasi, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2007.** Makro Ekonomi Modern. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Suyatno, 2000.** Analisa Economic Base terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tingkat II Qonogiri : Menghadapi Implementasi UU no 22/1999 dan UU no.25 /1999. Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. I. No.2
- Todaro, MP.2000.** Economic Development seventh edition, Longman Inc.England.
- Sunariyah, 2003.** pengantar pengetahuan pasar modal, yogyakarta : UPP AMP YKPN-Yogyakarta